

PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI JAWA TIMUR

Sayekti Suindyah D
dyahsyam@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACT

Investment, labor and government expenditure are important component for sustainable economic development process. This research aims is to analyze the effect of investment, labor, and government expenditure on Economic Growth in East Java Province. The hypotheses in this research is the investment, labor and government expenditure have influenced positive and significantly to the economic growth. Base on the data analysis, hypotheses is really accepted. This research shows that variable investment, labor and government expenditure have influence positive and significantly on economic growth. This indicates that three variables (investment, labor and government expenditure) have give contribution on economic growth is positively. This means if investment, labor and government expenditure are increasing because of grow up in economic growth in East Java Province. It is recommended that to increase economic growth of East Java Province, a police is needed to motivate all parties to make investment to this province. The effort to increase investment should be focused on activities that involve many workers. Therefore, it is recommended that to increase economic growth of East Java Province use to a police for motivate all parties to make investment, increase to labor quality and be careful to use a government expenditure.

Keywords: Investment, Labor, Government expenditure and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Menurut Todaro (2000) pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Menurut Todaro (2000) ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu: (1). Makanan (*sustenance*), artinya segala sesuatunya yang tidak hanya digunakan untuk mengganjal perut, tetapi juga mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara

fisik, (2). Jati diri (*self-esteem*), artinya adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa pantas dan layak untuk melakukan atau mengejar sesuatu, dan lain-lain. (3). Kebebasan (*freedom*), artinya kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur.

Hasil dari pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini mempunyai dampak yang besar yaitu terjadinya perubahan sektoral. Perubahan sektoral adalah adanya perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Perubahan ini juga terjadi pada tenaga kerja, banyak tenaga kerja yang pindah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menyebabkan kesempatan kerja di sektor pertanian mengalami penurunan.

Pendapat yang dikemukakan Jhingan (2002) tentang perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural yang dikemukakan Jhingan (2002) tersebut akan menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi, oleh karena itu, dengan adanya perubahan struktural tersebut industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini selalu berorientasi pada keberhasilan bidang ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor industri akan menyebabkan meningkatnya peranan sektor industri, karena pengembangan sektor

industri yang berbasis pertanian bagian yang cukup penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di Indonesia, yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ini akan menyebabkan semakin besar pula tingkat pertumbuhan sektor industri yang ada di daerah tersebut, yang ditunjukkan dengan semakin bertambah dan munculnya industri-industri baru, begitu pula yang terjadi di Propinsi Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur mempunyai luas mencapai 46.428,57 km ini terbagi dalam 29 kabupaten, 7 kota dan 2 kota administratif dengan jumlah penduduk 37.478.737 jiwa (tahun 2006). Data Susenas tahun 2000–2004 (BPS Jawa Timur, 2000-2004) menjelaskan bahwa jumlah tenaga kerja usia 15 tahun ke atas yang bekerja di berbagai sektor di Propinsi Jawa Timur tahun 2000 sebanyak 9.716.219 orang. Sebanyak 32.339 orang bekerja di sektor pariwisata.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 2000, selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 adalah 3,76% (2001), 3,80% (2002), 4,78% (2003), 5,83% (2004), 5,84% (2005) dan 5,80% (2006). Jumlah investasi Propinsi Jawa Timur tahun 2006 sebesar Rp 167.449.029.000.000,00 (PMDN) dengan jumlah proyek sebanyak 32 buah proyek dan US\$ 1.467.546 (PMA) dengan jumlah proyek sebanyak 83 buah proyek. Belanja daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2006 yang ditargetkan sebesar Rp 5.397.449.370.000 ternyata realisasinya adalah sebesar Rp 5.126.544.600.000, ini berarti antara target dan realisasi lebih kecil realisasi berarti ada efisiensi terhadap belanja daerah di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: (1). Apakah investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. (2). Apakah investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui apakah investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. (2). Untuk mengetahui apakah investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Manfaat penelitian ini adalah: (1). Bagi penentu kebijakan, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah. (2). Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti adanya temuan empiris bahwa analisis investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS

Pertumbuhan Ekonomi

Adanya perubahan struktural dalam proses pembangunan sudah lama muncul. Perubahan struktural ini biasanya ditandai dengan adanya perubahan pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat suatu negara. Masyarakat suatu negara akan menerima pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan struktural. Dengan semakin tingginya pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat suatu negara, maka akan menggeser peranan dari sektor pertanian ke sektor lain yang menjanjikan tingkat upah lebih tinggi, yaitu sektor industri dan jasa, ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuznets (dalam Todaro, 2000) perubahan struktur ditandai dengan: (1). Adanya perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor, (2). Menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap produksi nasional, (3). Meningkatnya sumbangan sektor industri terhadap produksi nasional, (4). Sektor jasa tidak begitu mengalami perubahan.

Hasil penelitian yang dilakukan Chenery (dalam Todaro, 2000) adalah terjadinya perubahan struktural ditandai dengan adanya perubahan sumbangan berbagai sektor dan industri-industri dalam sub sektor industri pengolahan kepada produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2005). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Menurut Arsyad (2004) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Ada enam ciri proses pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan Kuznets (dalam Todaro, 2000), yaitu: (1). Tingkat pertumbuhan output per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi. (2). Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja. (3). Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. (4). Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. (5). Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku. (6). Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*) memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Burhan et al., 2002).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan lamban. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki dan juga adanya kecenderungan peranan investor yang memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki 8 (delapan) fasilitas dan prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro 2003).

Investasi

Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*) (Fatimah, 2007).

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003).

Todaro (2000) mengemukakan bahwa persyaratan umum pembangunan ekonomi ada 3 (tiga) yaitu: a) Akumulasi modal, termasuk akumulasi modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, b) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c) kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari.

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1). investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (2). penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3). investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes, menitik beratkan pada peranan tabungan dan investasi sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 2004). Beberapa asumsi yang melandasi teori tersebut, antara lain: (1). Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh. (2). Dalam perekonomian dua sektor (Rumah tangga konsumen dan produsen) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. (3). Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). (4). Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal dan output (*Capital Output Ratio=COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio = ICOR*).

Tenaga Kerja

Faktor produksi manusia sifatnya berubah-ubah. Nilai tenaga kerja yang dicerminkan dengan upah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia tersebut. Makin tinggi kualitas tenaga kerja tersebut, maka makin tinggi pula upah yang diterima, dan sebaliknya jika kualitas tenaga kerja tersebut rendah, maka tingkat upah yang diterima juga rendah. Selain itu, tenaga kerja yang berkualitas akan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

Sumberdaya manusia mengandung dua pengertian, yaitu: (1). Sumberdaya manusia yang mengandung pengertian usaha kerja, artinya sumberdaya manusia yang mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. (2). Sumberdaya manusia yang menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Pengertian mampu bekerja adalah mampu untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis yang berupa barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Masalah ketenagakerjaan ini dikemukakan oleh Lewis (dalam Todaro, 2000) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lewis (dalam Todaro, 2000)

mengemukakan bahwa di negara terbelakang terdiri dari dua sektor di dalam perekonomian, yaitu: (1). Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang berkelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Sektor tradisional ini dikatakan mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah yang lebih murah. (2). Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Subri, 2003). Simanjuntak (dalam Subri, 2003) mengelompokkan tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari golongan yang bekerja dan menganggur atau yang mencari pekerjaan. Golongan yang bukan angkatan kerja terdiri dari yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain yang menerima pendapatan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Makmun dan Yasin (2003) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif selama tahun 1998 dan tahun 1999 sangat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.

Tujuan adanya perluasan kesempatan kerja adalah: (1). Menurunkan tingkat pengangguran yang terbuka maupun yang tersembunyi; (2). Berkembangnya kesempatan kerja yang semakin mampu menyerap angkatan kerja baru; (3). Menurunkan beban ketergantungan setiap orang yang bekerja.

Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja baru berarti adanya penciptaan pendapatan masyarakat yang akan mendorong daya beli masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja baru juga dapat mendorong *induced investment*, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Gravitiani, 2006). Permintaan tenaga kerja juga mengidentifikasi adanya determinasi permintaan tenaga kerja antara lain (Arfida, 2003): (1). tingkat upah, (2). teknologi, (3). produktivitas, (4). kualitas tenaga kerja, (5). fasilitas modal.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*)

adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah (Sukirno, 2005). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Landau (dalam Yuniyanto, 2011) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif tetapi tidak signifikan.

Lin (dalam Fatimah, 2007) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Lin juga menyatakan bahwa Hukum Wagner hanya berlaku untuk negara maju. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan. Melalui anggaran rutin, khususnya belanja rutin pegawai yang berupa gaji pegawai, pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui konsumsi masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-Propinsi-daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir-proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi Lee Robert et al., (dalam Yuniyanto, 2011).

Menurut Barro (dalam Purbadharmaja, 2006), kontribusi pengeluaran produktif akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2003) menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan pemerintah (ekspansi fiskal) maka akan menghambat investasi, yang pada gilirannya menurunkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah, antara lain:

Wibisono (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia. Variabel tergantung yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi regional pada 26 Propinsi di Indonesia (tidak termasuk Timtim) tahun 1975–1995, dan variabel bebas yang digunakan adalah *educational attainment*, *life expectancy*, tingkat inflasi, tingkat fertilitas, tingkat kematian bayi dan dummy regional. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square. Hasil penelitiannya adalah: (1). Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

ekonomi adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan tingkat kematian bayi. (2). Tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek negatif pada pertumbuhan ekonomi. (3). Propinsi-propinsi yang memiliki modal manusia yang tinggi akan tumbuh lebih cepat terhadap posisi *steady state*-nya masing-masing. (4). Peningkatan *educational attainment* sebesar satu satuan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB sebesar 1,5% sampai dengan 2,6%.

Pancawati (2000) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Rasio Kapital Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap GDP Indonesia. Variabel tergantung yang digunakan adalah pertumbuhan output (Y) dan variabel bebas yang digunakan adalah: rasio kapital-tenaga kerja, tingkat pendidikan, perubahan stok kapital dan pertumbuhan penduduk. Analisis yang digunakan adalah regresi dengan metode OLS. Hasil penelitiannya adalah: (1). Rasio kapital-tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (2). Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (3). Perubahan stok kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output. (4). Pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output.

Alkadri (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia 1969-1996. Hasil penelitiannya: (1). Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi: bantuan luar negeri, PMA, PMDN, Pajak, Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan angkatan kerja. (2). Variabel yang berpengaruh lemah terhadap pertumbuhan ekonomi: tabungan, ekspor, dan impor.

Yuliarmi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali. Variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Propinsi Bali (1994-2005), sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan metode OLS. Hasil penelitiannya adalah variabel bebas yang berupa konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Bali.

Diah Prasasti (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Perkembangan PDRB per kapita 30 Propinsi di Indonesia periode 1993-2003: pendekatan disparitas regional dan konvergensi. Variabel tergantung yang digunakan adalah PDRB per kapita, sedangkan variabel bebasnya adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan jenjang SMU, angkatan kerja, *dummy* variabel sumber daya alam dan *dummy* variabel krisis (mulai tahun 1997=1). Hasil penelitiannya adalah: (1). Variabel penduduk yang tamat SMU bernilai positif dan signifikan. (2). Variabel angkatan kerja tidak signifikan. (3). Variabel *dummy* SDA menunjukkan hubungan positif dan signifikan. (4). Variabel *dummy* krisis menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan di semua model.

Purbadharmaja (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Penelitian Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali, dengan hasil penelitiannya adalah variabel-variabel ekonomi yang berpotensi mempengaruhi PDRB Propinsi Bali diidentifikasi sebagai variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, jumlah kredit modal kerja, ekspor netto, nilai hasil produksi pertanian, investasi swasta domestik, investasi swasta asing, jumlah angkatan kerja, dan jumlah wisatawan asing.

Setelah melewati metode PCA dan MWD diperoleh model berbentuk linier dengan hasil menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh nyata terhadap PDRB adalah variabel pengeluaran dengan nilai t statistik sebesar 19.79 (signifikan), sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi PDRB secara nyata adalah variabel investasi dengan nilai t statistik sebesar 0.75 (nonsignifikan). Variabel investasi tidak signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh investasi yang dilakukan di Bali tidak efisien. Interpretasi terhadap implikasi variabel ekonomi dalam model menunjukkan bahwa variabel ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Propinsi Bali adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pola pikir *dollar minded* dalam masyarakat di Bali. Pengeluaran konsumsi pemerintah daerah yang tinggi menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

Penelitian terkait telah dilakukan oleh Chemingui dan Ayadi (2003) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Algeria. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penggunaan stok modal manusia secara lebih baik melalui pengurangan tingkat pengangguran dan menaikkan tingkat upah riil. Pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja secara berkelanjutan di Algeria mensyaratkan perubahan terus menerus dalam ekonomi politik domestik. Perluasan kesempatan kerja mensyaratkan juga perubahan dalam kebijakan dan peraturan pasar tenaga kerja. Fertig (2003) melakukan penelitian mengenai dampak integrasi ekonomi Uni Eropa terhadap kesempatan kerja tahun 1980–2000 terungkap bahwa indeks integrasi untuk negara anggota bagian selatan, tingkat pertumbuhan investasi, GDP per kapita dan trend waktu berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, sedangkan variabel yang lain berpengaruh negatif. Penyatuan Uni Eropa menyebabkan adanya tambahan kesempatan kerja serta peningkatan hasil (*outcome*).

Wahyuni (2004) meneliti tentang peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di 20 negara Asia Pasifik yang mempunyai kesamaan latar belakang ekonomi periode 1980 – 2000. Studi tersebut memberikan hasil bahwa koefisien pangsa pengeluaran pemerintah terhadap GDP adalah negatif. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa komponen konsumsi mendominasi pengeluaran anggaran pemerintah. Hasil ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar negara-negara dikawasan itu menemui masalah dalam

manajemen pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran yang besar untuk konsumsi bagi kepentingan pemerintah sendiri menutupi efek positif investasi publik.

Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dengan tujuan penelitian tersebut, maka jenis atau rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memuat penjelasan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada dan pengujian hipotesis (*eksplanatory*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan memberikan penjelasan pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis (Arikunto, 2002).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) data jumlah investasi dan sumber investasi, 2) data jumlah tenaga kerja, 3) data jumlah pengeluaran pemerintah, 4) data pertumbuhan ekonomi.

Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, majalah dan referensi lain yang memberikan informasi tentang investasi, ketenagakerjaan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan tahun penelitiannya adalah tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Nasir, 1999). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X):
 - a. Investasi (X_1), yaitu jumlah investasi asing (PMA) yang masuk ke Jawa Timur selama periode penelitian (US\$)
 - b. Tenaga Kerja (X_2), yaitu jumlah angkatan kerja di Jawa Timur (orang)
 - c. Pengeluaran pemerintah (X_3), yaitu jumlah realisasi total belanja daerah pemerintah propinsi Jawa Timur (Rp)
2. Variabel Tergantung (Y)
Pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan PDRB propinsi Jawa Timur selama periode penelitian (%).

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang menggunakan Logaritma Natural, dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2010):

$$\text{Ln } Y = \text{Ln } \alpha + \beta_1 \text{ Ln } X_1 + \beta_2 \text{ Ln } X_2 + \beta_3 \text{ Ln } X_3$$

Keterangan;

Ln Y : Pertumbuhan ekonomi (%)

Ln X_1 : Jumlah investasi (PMA) (US\$)

Ln X_2 : Jumlah tenaga kerja (orang)

Ln X_3 : Jumlah pengeluaran pemerintah (Rp)

α : intersep

β_i : koefisien regresi

Pengujian Model Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ragnar Frisch (dalam Gujarati, 2001) suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linear yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Terjadinya multikolinearitas yang rawan pada model regresi bisa didektesi keberadaannya bila R^2 dari auxiliary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai *varian inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Selain menggunakan R^2 dan VIF juga dapat menggunakan TOL (Tolerance) untuk mendeteksi apakah suatu model terkena multikolinearitas atau tidak, jika nilai TOL nya lebih besar dari 0,10, maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i)

meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode grafik *scatter plot*, uji White, dimana apabila nilai probabilitas (p value) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut ruang atau waktu. Cara mendeteksi autokorelasi dapat digunakan dengan metode grafik dan uji d dari Durbin-Watson. Adapun kriteria yang digunakan adalah: 1) Jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari -2 , ini berarti ada autokorelasi positif. 2) Jika nilai Durbin-Watson terletak diantara -2 sampai $+2$, ini berarti tidak ada autokorelasi. 3) jika nilai Durbin-Watson lebih besar $+2$, ini berarti ada autokorelasi negatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jumlah Investasi (PMA dan PMDN)

Jumlah investasi baik berupa Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke Propinsi Jawa Timur selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 mengalami fluktuasi, seperti yang tampak dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Data Jumlah Investasi (PMA dan PMDN)
di Jawa Timur (2003 – 2010)
(dalam 000.000 Rp.)

Tahun	PMA (US\$)	Perkembangan (%)	PMDN (Rp)	Perkembangan (%)
2003	456.659	320,14	1.553.224	90,94
2004	357.770	-21,65	4.055.266	161,09
2005	554.334	54,94	5.516.851	36,04
2006	1.467.546	164,74	167.449.029	2960,19
2007	855.227	-41,72	16.705.091	-90,02
2008	2.585.906	202,36	19.912.810	19,20
2009	1.561.787	-39,60	25.405.226	27,58
2010	2.052.716	31,43	41.009.463	61,42

Sumber: Propinsi Jawa Timur Dalam angka 2008, 2010

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah investasi yang masuk ke Propinsi Jawa Timur selama periode 2003 sampai dengan 2010 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2003 jumlahnya sebesar US\$ 456.659, terjadi penurunan di tahun 2004, yaitu menjadi US\$ 357.770, penurunan ini salah satunya disebabkan karena pada tahun 2004 Indonesia melaksanakan Pemilu, jadi para pemodal asing menganggap bahwa kondisi politik di Indonesia sedang hangat-hangatnya, sehingga menyebabkan menurunnya jumlah PMA yang masuk ke Indonesia khususnya ke Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan barometernya Indonesia.

Tahun 2005 terjadi kenaikan menjadi US\$ 554.334 dan tahun 2006 terjadi lonjakan kenaikan yang sangat tinggi sekali, yaitu menjadi US\$ 1.467.546, sedangkan di tahun 2007 mengalami penurunan menjadi US\$ 855.227, penurunan ini terjadi karena pada tahun 2007, situasi keamanan di Indonesia belum kondusif karena adanya serangan dari kelompok teroris, faktor inilah yang menyebabkan menurunnya jumlah investor asing ke Indonesia khususnya Jawa Timur. Tahun 2008 mengalami kenaikan, tahun 2009 menurun lagi dan tahun 2010 meningkat lagi tetapi jumlahnya masih di bawah tahun 2008.

Investasi yang berasal dari dalam negeri atau yang disebut dengan PMDN, mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan. Kenaikan yang tertinggi terjadi di tahun 2006, yaitu sebesar Rp. 167.449.029. Kenaikan ini mencapai 2960,19% (kenaikan yang sangat fantastis) dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur sudah mulai dipercaya oleh investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya ke Jawa Timur.

Pada tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat fantastis dibandingkan tahun 2006. Penurunan ini penyebabnya hampir sama, karena adanya situasi keamanan di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang kurang stabil pada saat itu. Dan mulai tahun 2008 jumlah PMDN yang masuk ke Jawa Timur sudah mulai mengalami peningkatan, begitu juga dengan tahun 2009 dan 2010 juga mengalami peningkatan. Ini dapat dikatakan bahwa iklim investasi di Jawa Timur sudah mulai kondusif dan investor dalam negeri sudah mulai menanamkan kepercayaannya untuk menginvestasikan dananya di kabupaten/kota di Jawa Timur, karena situasi politik dan keamanan yang sangat mendukung kegiatan investasi tersebut.

Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (BPS, 2004b). Tenaga kerja di propinsi Jawa Timur dikelompokkan menjadi tiga yaitu angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan bekerja. Data tentang ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Bekerja
Di Jawa Timur Tahun 2003 – 2010 (orang)

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Bekerja
2003	19.086.228	11.200.347	14.367.981
2004	18.816.040	11.530.305	14.165.138
2005	23.391.631	13.679.100	34.294.133
2006	23.176.851	1.575.299	34.214.339
2007	20.117.824	1.366.503	18.751.421
2008	20.178.590	1.296.313	18.882.277
2009	20.338.568	1.033.512	19.305.056
2010	19.527.000	828.943	18.698.108

Sumber: Susenas 2006 dan hasil survei penduduk tahun 2007,2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu dari 19.086.228 orang (2003) menjadi 20.338.568 orang (2009) atau meningkat sebesar 6,56% dan mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu menjadi sebesar 19.527.000 (Agustus 2010), sedangkan jumlah bukan angkatan kerja mengalami penurunan, yaitu dari 11.200.347 orang (2003) menjadi 828.943 orang (2010).

Dan jumlah orang bekerja selama kurun waktu 2003–2010 mengalami peningkatan dari 14.367.981 orang (2003) menjadi 18.698.108 orang (2010) atau meningkat sebesar 30,14%. Ini berarti jumlah orang yang siap bekerja (angkatan kerja) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan jumlah orang masih mencari pekerjaan dan menganggur mengalami penurunan. Dan data tentang jumlah tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan.

Pengeluaran Pemerintah

Selain menerima pendapatan daerah dalam kegiatan sehari-harinya pemerintah Propinsi Jawa Timur juga melakukan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan dan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan di Propinsi Jawa Timur dengan sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan selama satu periode waktu tertentu. Jumlah pengeluaran ini disebut dengan pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Jawa Timur baik berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Data jumlah pengeluaran pemerintah Propinsi Jawa Timur selama periode tahun 2003-2010 dapat ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Pengeluaran Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Tahun 2003 – 2010 (dalam 000.000 Rp)

Tahun	Target	Realisasi	Perkembangan (%)
2003	3.738.092,80	3.532.958,32	20,39
2004	3.814.329,38	3.516.027,16	- 0,48
2005	4.381.377,60	4.045.400,89	15,06
2006	5.397.449,37	5.126.544,60	26,73
2007	5.267.845,35	5.709.064,73	11,36
2008	7.314.357,55	6.639.780,93	16,30
2009	8.395.165,21	7.602.038,81	14,49
2010	7.826.709,59	5.622.525,00	-26,04

Sumber: Propinsi Jawa Timur dalam angka 2007, 2010.

Tabel 3 menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 26,73%, sedangkan pengeluaran pemerintah tahun 2007 kalau dilihat dari nilai nominalnya mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp 5.709.064.730.000 atau sedangkan jika dilihat nilai persentasenya kenaikannya sebesar 11,36%. Pada tahun 2007, ini sajalah yang besarnya pengeluaran pemerintah di atas nilai atau jumlah yang ditargetkan oleh pemerintah propinsi Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah propinsi Jawa Timur tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 16,36%, tahun 2009 juga mengalami kenaikan sebesar 14,49% sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar (-26,04%). Menurunnya belanja pemerintah ini disebabkan karena terlambatnya pengesahan APBD tahun 2010.

Pertumbuhan Ekonomi

Sebuah negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika dan hanya jika negara tersebut mengalami kenaikan output secara berkesinambungan, adanya perkembangan teknologi dan terjadinya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi. Ini berarti bahwa adanya pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan adanya inovasi tehnologi dan sosial. (Kuznets dalam Todaro, 2000). Pendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dari sisi permintaan adalah ekspor-impor. Seiring dengan perbaikan ekonomi global perdagangan luar negeri (ekspor-impor) Jawa Timur menunjukkan kinerja yang baik sehingga perdagangan luar negeri mengalami surplus. Dari sisi penawaran pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan.

Data pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama periode 2003 sampai dengan tahun 2010 seperti tampak dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur
Tahun 2003 – 2010 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2003	4,78
2004	5,83
2005	5,84
2006	5,80
2007	6,11
2008	5,94
2009	5,01
2010	6,68

Sumber: Propinsi Jawa Timur Dalam Angka 2007, 2010

Tabel 4 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 mengalami fluktuatif, sebagai berikut tahun 2003 sebesar 4,78%, tahun 2004 sebesar 5,83%, tahun 2005 sebesar 5,84%, tahun 2006 sebesar 5,80% dan tahun 2007 sebesar 6,11%, tahun 2008 menurun sebesar 5,94%, tahun 2009 menurun sebesar 5,01% dan tahun 2010 naik sebesar 6,68%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Jawa Timur mengalami perbaikan setelah terjadinya krisis ekonomi atau dapat dikatakan krisis multidimensional pada tahun 1997/1998.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

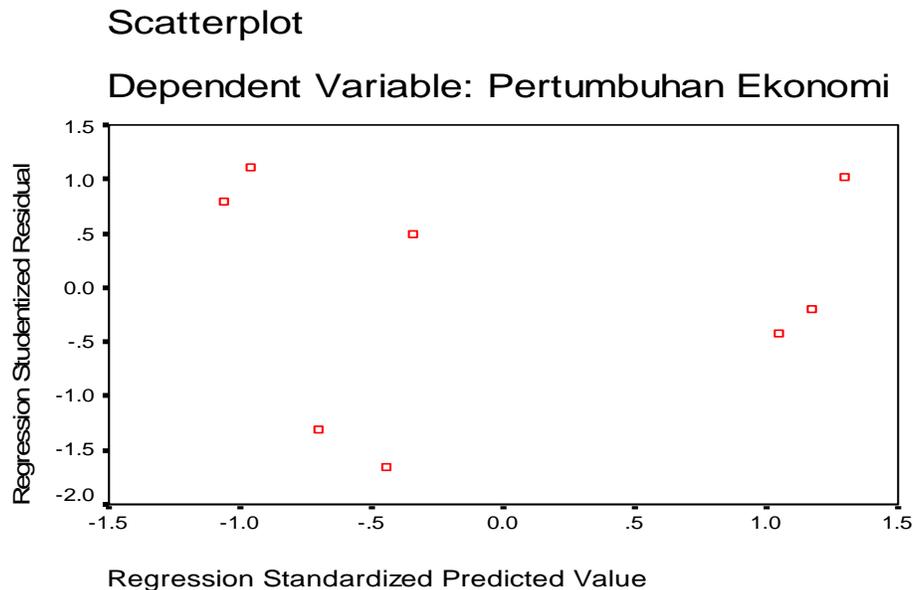
Tabel 5
Coefficients(a)

Model	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Investasi	0.238	4.198
	Tenaga Kerja	0.971	1.030
	Pengeluaran Pemerintah	0.242	4.136

a Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil perhitungan dalam Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh dari ketiga variabel tersebut melebihi nilai 1 (satu) atau lebih kecil dari 10, yaitu 4.198 (investasi), 1.030 (tenaga kerja) dan 4.136 (pengeluaran pemerintah) dan nilai Tolerance (TOL) dari ketiga variabel tersebut mempunyai angka lebih besar dari 0,10, yaitu 0.238 (investasi), 0.971 (tenaga kerja) dan 0.242 (pengeluaran pemerintah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Scatterplot

Gambar 1 menunjukkan bahwa tampak titik-titik hasil perhitungan analisis regresi menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Regression studentized Residual) dan ini berarti bahwa dalam model tersebut tidak memiliki problem heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 6
Model Summary(b)

Model	Durbin-Watson
1	1.987 (a)

a Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja, Investasi

b Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil perhitungan analisis dalam model regresi tersebut tidak ada autokorelasi negatif ataupun positif, karena nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1.987, terletak antara -2 sampai $+2$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standar Error the Estimate
1	.946 ^a	.921	.891	2026.3904

Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja, Investasi

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R = 0,946 artinya adanya hubungan yang positif dan kuat antara variabel bebas investasi (X_1), tenaga kerja (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) terhadap variabel tergantung pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai R square (R^2) = 0,921 artinya 92,10% variabel tergantung pertumbuhan ekonomi (Y) dijelaskan oleh variabel bebas investasi (X_1), tenaga kerja (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) dan sisanya 7,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar model,. Ini juga berarti bahwa model tersebut betul-betul baik atau sesuai.

Tabel 8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
1. (Constant)	2.515	10.716		.235	.826
Investasi	.124	.133	.853	.936	.040
Tenaga kerja	.054	.585	.042	.093	.049
Pengeluaran Pemerintah	.220	.338	.589	.651	.050

a. dependent variable: pertumbuhan ekonomi

Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam model itu ada 3 (tiga) koefisien variabel bebas dan 1 (satu) variabel tergantung, dengan hasil perhitungan (Unstandardized) sebagai berikut:

- Contanta = 2.515, artinya jika tidak ada investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2.515%.
- Investasi = 0.124, artinya jika ada investasi asing (PMA) yang masuk ke Jawa Timur sebesar US\$ 1, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0.124% dengan syarat variabel bebas (X_2 dan X_3) yang lain tetap.

- c. Tenaga kerja = 0.054, artinya jika ada penambahan angkatan kerja sebanyak satu orang maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0.054% dengan syarat variabel bebas (X_1 dan X_3) yang lain tetap.
- d. Pengeluaran pemerintah = 0.220, artinya jika ada penambahan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1 yang digunakan untuk belanja daerah, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0.220% dengan syarat variabel bebas (X_1 dan X_2) yang lain tetap.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari kolom sig (signifikansi) untuk hasil perhitungan nilai t hitung, dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas investasi ($X_1 = 0.040$), tenaga kerja ($X_2 = 0.049$) dan pengeluaran pemerintah ($X_3 = 0.050$) tersebut mempunyai nilai yang lebih kecil dari nilai probabilitasnya yaitu 0.05. Ini berarti secara parsial ketiga variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tergantung pertumbuhan ekonomi (Y).

Pengujian Hipotesis secara serempak diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari nilai F hitung diperoleh hasil signifikansi sebesar 0.000 untuk ketiga variabel bebas (X_1, X_2 dan X_3), nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitasnya yaitu 0.05. Ini berarti bahwa pengujian hipotesis secara serempak menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas (X_1 , X_2 dan X_3) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel tergantung (Y).

Pembahasan

Dari hasil analisis regresi diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel bebas jumlah investasi asing (PMA) (X_1), jumlah tenaga kerja (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ini sejalan dengan hasil penelitian Alkadri (2006), Wibisono (2001), Pancawati (2000), Yuliarini (2008), Wahyuni (2004) dan Chemingui dan Arsyad (2003). Secara bersama-sama atau serempak ketiga variabel bebas yaitu jumlah investasi (X_1), jumlah tenaga kerja (X_2) dan pengeluaran pemerintah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Dari hasil analisis ini menunjukkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu masih sangat tergantung dari besarnya jumlah investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya PMA, karena dengan semakin meningkatnya jumlah PMA yang masuk ke Jawa Timur ini berarti dapat digunakan sebagai modal untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Timur. Dengan jumlah PMA yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya kepercayaan dari negara lain untuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Dengan berhasilnya pembangunan ekonomi, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat khususnya di

Jawa Timur. Agar investasi asing tetap masuk ke Jawa Timur, maka pemerintah Propinsi Jawa Timur harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, bisa menarik investor, dan bisa memberikan kemudahan-kemudahan agar investor bisa masuk ke Jawa Timur. Selain itu dengan dukungan jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat akan dapat mendorong dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Jawa Timur. Dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas yang bekerja, maka akan dapat mendorong percepatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan khususnya di bidang ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap untuk bekerja di berbagai sektor di Jawa Timur. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan penambahan jumlah penyediaan lapangan kerja. Bertambahnya jumlah lapangan kerja akan menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam pekerjaan tersebut.

Untuk penyediaan lapangan kerja dan lapangan berusaha dibutuhkan sejumlah anggaran baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan bertambahnya jumlah investasi yang masuk ke Jawa Timur dan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun akan mendukung penyediaan jumlah lapangan kerja dan lapangan berusaha, dan ini akan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur. Berkurangnya jumlah pengangguran dan diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pembangunan di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah ini sebanding dengan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori *Granger Causality* (Yunianto, 2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara PDRB dengan total pengeluaran pemerintah daerah.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa: (1). Dengan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya investasi asing akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2). Jumlah tenaga kerja yang bekerja akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Besarnya pengeluaran pemerintah akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di Jawa Timur, karena dengan semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Saran

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan: (1). Perlu adanya kebijakan yang membantu dan memberikan kemudahan kepada para investor asing untuk masuk ke Indonesia, khususnya Jawa Timur. (2). Perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang akan memasuki pasar kerja, agar mereka mudah dan dapat digunakan oleh perusahaan/ pengguna tenaga kerja. (3). Peningkatan kualitas SDM ini dipersiapkan terlebih dahulu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, ini perlu diberikan karena untuk menjadi individu yang memiliki keahlian dasar dibutuhkan pendidikan yang memadai dan pelatihan-pelatihan. (4). Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi, ini bukan berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus ditingkatkan secara besar-besaran tanpa arah yang jelas, tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah itu harus diimbangi dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor atau bidang. (5). Ukuran keberhasilan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi belum bisa mencerminkan sebuah keberhasilan apabila tidak diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, menurunnya pengangguran dan terbuka luasnya lapangan pekerjaan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan secara time series. Jika penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara data time series dengan cross sectional, maka akan diperoleh hasil yang lebih smooth (halus).

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri. 2006. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1969-1996. *Jurnal Pusat Studi Indonesia*. 9(2): 1-15
- Arfida, B.R. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi revisi V. Rineka Cipta Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan*. Edisi keempat. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. 2004b. *Susenas Tahun 2000-2004. Propinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Surabaya.

-
- _____. 2008. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2008*, Badan Pusat Statistik Surabaya.
-
- _____. 2010. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Surabaya.
- Burhan, Yusnita, Sri. 2002. Potret Tenaga Kerja Indonesia Sejak Krisis Ekonomi 1997. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*. 2(2): 17-25.
- Chemingui, Mohamed Adelbasset, dan Nasima Ayadi. 2003. Labor Market and Economic Growth in Algeria, www.eclac.org/publicaciones/xmi/2/19952/leg2187-Ranis.Pdf. 11 Desember 2011.
- Fatimah, Siti NH dan Eny Setyowati. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2002. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(1): 80-95.
- Fertig, Michael. 2003. The Impact of Economic Integration on Employment An Assessment in The Context of EU Enlargement, IZA Discussions Papers No. 919. <http://www.IZA.org>. Diakses tanggal 11 Desember 2011.
- Gravitiani, Evi. 2006. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7(1): 35-48.
- Gujarati, Damodar N. 2001. *Basic Econometric*. 3rd ed, McGraw Hill International Edition. New York.
- Jhingan, M.L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. cetakan kesembilan. diterjemahkan oleh D. Guritno. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Makmun dan Yasin, Akhmad. 2003. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. 7(3): 57-83.
- Mankiw, Gregory. N. 2003. *Macroeconomics*. 5rd ed, by Worth Publishers New York and Basingstokes. Terjemahan. Penerbit Erlangga Surabaya.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Pancawati, Neni. 2000. Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 15(02): 268-283.

- Prasasti, Diah. 2006. Perkembangan PDRB Per Kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993–2003, Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 21(4): 344-360
- Purbadharmaja, IBP. 2006. Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*. 11(1): 79-91.
- Ranis, Gustaw Stewart. 2001. Economic Growth and Human Development. *World Development*. 28(2): 197-219.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama. PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. LPFEUI Jakarta.
- Sutarno dan Mudrajad K. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*. 8(2): 63-71.
- Todaro, Michael P. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi kelima. Bumi Aksara Jakarta.
- Undang-Undang, “Tentang Ketenagakerjaan”, Nomor: 13 tahun 2003, Jakarta, tanggal 25 Maret 2003. <http://www.uuri.or.id/pdf.htm>. Diakses tanggal 19 September 2010.
- Wahyuni, Heni. 2004. The Role of Government in Economic Growth: Evidence From Asia and Pasific Countries. *Journal of Indonesian Economy and Business*. 19(1): 71-81.
- Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 5(2): 224-235.
- Yuliarmi, Nyoman. 2008. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi bali. *Buletin Studi Ekonomi*. 13(2): 102-118.
- Yunianto, Totok. 2011. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Nganjuk. *Thesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Jombang.